

Pemilu, Politik Patronase dan Ideologi Parpol

Oleh : S.L. Harjanto

Abstract

Patronase politic still present in 2014 election process. By its variants, patronase politic is used by legislator candidate and political party in order to win the election in Jakarta. Ironically, these patronase practice is not associated with the ideology of party. These practice get into both the nationalist and Islamist parties not only clearly but also silently. It was closely no differences in the aspect of the form of those patronase. The differences are in the aspect of the actor and target of the patronase.

Keyword : patronase politic, legislator candidate, political ideology of party

A. Pengantar

DKI Jakarta dikenal sebagai jantungnya kekuasaan dan pemerintahan di Indonesia. Aktivitas politik dan pemerintah begitu menonjol di sini. Situasi ini juga tidak terlepas dari keberadaan pucuk tertinggi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang semuanya berada di Jakarta. Semua pucuk pimpinan Parpol pun ada di sini. Maka itu, kondisi politik di Jakarta sangat dinamis dibanding daerah lain di Indonesia. Selain sebagai pusat politik pemerintahan, Jakarta juga dikenal sebagai kota bisnis dan ekonomi. Sentral bisnis tidak hanya di Jakarta Pusat. Tetapi juga tersebar di Jakarta Selatan, Barat dan Timur. Sebagai pusat bisnis dan ekonomi, sedikit banyak juga mempengaruhi perilaku dan budaya politik di Jakarta.

Yang unik di Dapil DKI Jakarta 2 (Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan), masyarakatnya cenderung rasional dan terbuka. Tetapi di sisi lain, pilihan politik yang berdasarkan sentimen tokoh, suku, kedaerahan dan agama masih berlangsung. Untuk itu, partai politik yang mengusung identitas keislaman masih mendapat dukungan sebagian masyarakat. Hal ini tercermin dalam perolehan kursi legislatif, baik di tingkat pusat maupun provinsi. Selain politik aliran, politik uang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sikap politik masyarakat di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan pada Pemilu 2014.

Maka itu, caleg yang berasal dari Parpol berideologi nasionalis maupun religius (Islam) tidak bisa terhindar untuk melakukan praktek politik uang atau politik patronase. Mereka bersaing menggunakan politik uang untuk mendapat dukungan pemilih pada Pemilu 2014 ini.

Bentuk patronase beragam. Dari pemberian uang, barang hingga janji-janji bantuan setelah caleg berhasil terpilih. Maka, dalam tulisan ini akan mengkomparasikan bentuk politik uang atau patronase antara caleg asal Parpol Nasionalis dengan Islamis. Yang masuk dalam kelompok Parpol nasionalis adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, Hanura dan PKPI. Sedangkan kelompok Parpol beridentitas Islamis adalah PKS, PPP, PAN, PKB dan PBB. Untuk membandingkan praktik politik patronase di Dapil DKI Jakarta 2, dalam tulisan ini melihat dari tiga aspek. *Pertama*, bentuk patronase, *kedua*, sasaran patronase dan *ketiga*, aktor yang terlibat dalam politik patronase. Tiga aspek ini kemudian menjadi struktur utama penulisan dalam laporan ini.

Dalam penelitian ini terungkap bawah praktik politik patronase menjangkiti baik caleg nasionalis maupun Islamis. Bentuk patronase antara caleg nasionalis dan Islamis nyaris tidak ada perbedaan yang kentara. Namun, ada dua pembeda di antara keduanya. Dua pembeda itu adalah soal sasaran dan aktor yang terlibat dalam politik patronase. Bagi caleg nasionalis, sasaran patronase lebih pada kelompok masyarakat yang bersifat heterogen. Seperti, RT/RW, kampung dan kelurahan. Sementara itu, aktor yang terlibat yakni ketua RT/RW, tokoh masyarakat dan ketua karang taruna. Sementara itu, sasaran patronase caleg Islamis lebih spesifik. Yakni, komunitas masyarakat yang memiliki kesamaan religiusitas. Seperti majelis taklim, komunitas masjid dan mushola, pondokpesantren dan Ormas Islam. Sementara itu, distribusi patronase melibatkan pengurus majelis taklim, pengurus masjid, pondok pesantren dan Ormas Islam.

B. Jejak Persaingan Dua Kubu di Ibu Kota

Dapil DKI Jakarta II terbagi dalam tiga wilayah. Yakni Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri. Secara geografi, Jakarta Selatan terletak pada 106°22'42 Bujur Timur (BT) s.d. 106°58'18 BT, dan 5°19'12 Lintang Selatan (LS). Luas Wilayah sesuai dengan Keputusan Gubernur KDKI Nomor 1815 tahun 1989 adalah 145,37 km² atau 22,41% dari luas DKI Jakarta. Jumlah penduduk yang tinggal di Jakarta Selatan sebanyak 2.057.080 jiwa. Mereka tersebar di 10 kecamatan dan 65 kelurahan, berada di belahan selatan banjir kanal dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Banjir Kanal Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan
Sebelah Utara : Tanah Abang, Jl. Kebayoran Lama dan Kebun
Jeruk
Sebelah Timur : Kali Ciliwung
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Administrasi Depok

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Ciledug, Kota
Administrasi Tangerang

Sementara Jakarta Pusat sebelah utara berbatasan dengan Jakarta Utara, sebelah timur dengan Jakarta Timur, sebelah selatan Jakarta Selatan dan sebelah barat dengan Jakarta Barat. Di Jakarta Pusat terdapat delapan kecamatan. Yakni Gambir, Tanah Abang, Menteng, Senen, Cempaka Putih, Johar Baru, Kemayoran dan Sawah Besar.

Wilayah Jakarta Pusat dan Selatan umumnya merupakan kawasan pusat bisnis dan pelayanan jasa. Sebagai ibu kota negara, Jakarta juga menjadi pusat pemerintahan. Di daerah ini terhadap pusat perkantoran dan bisnis yang menjadi denyut nadi perekonomian di DKI Jakarta. Di Jakarta Pusat beberapa wilayah yang jadi sentral bisnis antara lain, Senen, Kuningan, Menteng dan Jalan Jenderal Sudirman. Sementara itu, di Jakarta Selatan yang menjadi pusat bisnis antara lain Blok M dan Cilandak.

Budaya Jakarta merupakan budaya campuran dari beragam etnis dan agama. Sejak Zaman Belanda, Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang menarik pendatang dari dalam dan luar nusantara. Suku-suku yang mendiami Jakarta antara lain Betawi, Jawa, Sunda, Minang, Batak, Dan Bugis. Selain budaya Arab, Tiongkok, India dan Portugis. Suku Betawi yang diyakini sebagai penduduk asli Jakarta sebenarnya berasal dari hasil perkawinan antar etnis dan bangsa dimasa lalu. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh belanda ke Batavia.

Apa yang disebut dengan orang atau suku Betawi sebenarnya terhitung pendatang baru di Jakarta. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta, Seperti orang Sunda, Jawa, Arab, Bugis, Makassar, Ambon, Melayu, dan Tionghoa. Asumsi kebanyakan orang tentang masyarakat Betawi ini jarang yang berhasil, baik dalam segi ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Padahal tidak sedikit orang Betawi yang berhasil. Beberapa dari mereka adalah Muhammad Husni Thamrin, Benyamin Sueb , dan Fauzi Bowo mantan Gubernur Jakarta saat itu.

Meski ada kelompok kelas atas, golongan menengah ke bawah merupakan kelompok pemilih dominan di Dapil DKI Jakarta 2. Kelompok ini cenderung pragmatis dalam menentukan pilihan politiknya. Walaupun ada pula sebagian kecil kelompok ini yang idealis dan rasionalistik. Pada Pemilu 2014 Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 2 terbagi dalam 3 wilayah. Yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri (LN). Dapil yang memperebutkan 7 kursi DPR pusat ini disebut Dapil keras.

DPT dan DPLN di DKI Jakarta 2 pada Pemilu 2014 kurang lebih sebanyak 4 juta pemilih. Dengan perincian, Jakarta Pusat di 8 kecamatan, 44 kelurahan dengan jumlah TPS 1.842 dari 381.790 pemilih laki-laki, 753.880 pemilih perempuan dengan total pemilih di Jakarta Pusat 753.880 pemilih. Jakarta Selatan di 10 kecamatan, 65 kelurahan dengan jumlah TPS 3.769 dari 792.291 pemilih laki-laki, 775.588 pemilih perempuan dengan total pemilih di Jakarta Pusat 1.567.879 pemilih. Sementara itu jumlah Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) sebanyak 2.025.005 pemilih yang tersebar di 99 negara.

Jejak persaingan kubu caleg nasionalis dengan caleg Islamis di DKI Jakarta tampak dalam setiap perhelatan pemilu. Namun sejauh ini, persaingan itu dimenangkan oleh caleg nasionalis. Kendati begitu, dukungan pemilih pada caleg Islamis juga tak bisa dipandang enteng. Ini tampak dari keterwakilan caleg Islamis yang berhasil duduk di DPRD DKI maupun DPR pusat.

Saat Pemilu 2009 ada empat Parpol yang bisa meraih kursi. Yakni Golkar, Demokrat, PDIP, PKS dan PPP. Saat itu, Demokrat berhasil mendapat 3 kursi. Sedangkan Golkar, PDIP, PKS dan PPP berbagi masing-masing 1 kursi. Dari perolehan kursi itu tampak jika Parpol nasionalis mendapat kursi lebih banyak dibanding parpol Islamis. Yakni, 5 caleg nasionalis dan 2 kursi direbut caleg Islamis. Dari 7 anggota DPR RI, kini hanya empat yang maju lagi dalam pemilu 2014. Sedangkan hasil Pemilu 2014, caleg nasionalis masih dominan dibanding caleg Islamis.

Untuk lebih mudah melihat pertarungan antara caleg nasionalis dengan caleg Islamis pada Pemilu 2009 dan 2014 akan disajikan data dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel. I

Perbandingan Perolehan Kursi DPR Pusat Caleg Nasionalis dan Islamis di Dapil DKI 2 Jakarta pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014

Ideologi/Identitas Caleg	Kursi DPR RI Pemilu 2009	Kursi DPR RI Pemilu 2014
Nasionalis	5 (Demokrat 3 kursi, PDIP 1 kursi, Golkar 1 kursi)	5 (PDIP 2 kursi, Golkar 1 kursi, Demokrat 1 kursi dan Gerindra 1 kursi)
Islamis	2 (PKS 1 kursi dan PPP 1 kursi)	2 (PKS 1 kursi dan PPP 1 kursi)

Dari tabel di atas menunjukkan jika caleg nasionalis lebih dominan dibanding caleg Islamis dilihat dari perolehan kursi di DPR pusat, baik hasil pemilu 2009 maupun 2014. Yakni, caleg nasionalis menguasai 5 kursi, sedangkan caleg Islamis merebut 2 kursi. Kendati begitu, dengan

keberhasilan mempertahankan 2 kursi, maka kekuatan dukungan caleg Islamis di Dapil DKI 2 Jakarta tidak bisa dianggap remeh.

Pada Pemilu 2014, persaingan dua kubu makin sengit. Ini bisa dilihat dari sejumlah tokoh populer dan incumbent yang dipasang masing-masing kubu untuk menjadi caleg. Kelompok caleg nasionalis yang populer yakni Caleg Demokrat, Melani Leimena (incumbent), Caleg PDIP Eriko Sutarduga (incumbent), Caleg Golkar, Fayakhun Andriadi (incumbent), Caleg Demokrat Kartorius Sinaga (akademisi UI) & Yenny Rahman (artis), Caleg Gerindra Biem Triani Benjamin (anggota DPD) dan Bondan Winarno (host).

Di kubu lain, sejumlah nama populer dan incumbent juga dipasang masing-masing Parpol beridentitas Islamis untuk menjadi caleg. Nama-nama itu adalah Caleg PKS Hidayat Nurwahid (ketua Fraksi PKS DPR Pusat), Dany Anwar (anggota DPD), Igo Ilham (anggota DPRD DKI), Caleg PPP Okky Asokawati (incumbent), Kivlan Zen (bekas Kaskostrad), Caleg PKB Abdul Wahid Maktub (bekas Dubes Qatar) dan Caleg PAN Dwiki Darmawan (artis).

Berdasar rekapitulasi final Dapil DKI Jakarta 2, gerbong caleg nasionalis paling banyak menempatkan kursi di DPR pusat. Dalam bentuk tabel, berikut caleg terpilih DPR RI dari Dapil DKI Jakarta 2. Data ini berdasarkan hasil penetapan KPU Pusat.

Tabel. 2
Perolehan Kursi DPR Pusat Dapil DKI Jakarta 2 Pemilu 2014

Ideologi/Identitas Caleg	Nama Caleg Terpilih	Parpol	Jumlah Total Kursi
Nasionalis	Eriko Sutarduga Masinton Pasaribu Fayakhun Andriadi Biem Triani Benyamin Melani Leimena Suharli	PDIP PDIP Golkar Gerindra Demokrat	5
Islamis	Hidayat Nurwahid Okky Asokawati	PKS PPP	2

Sumber : Diolah dari hasil pleno KPU Pusat

Dari data tabel di atas tampak jika caleg nasionalis masih dominan dibandingkan caleg Islamis. Ini tampak dari hasil perolehan kursi di DPR pusat. Caleg nasionalis mendapatkan 5 kursi dan caleg Islamis mendapat 2 kursi. Komposisi ini sama persis seperti hasil Pemilu 2009.

C. Bentuk Patronase

Meski dengan kadar yang berbeda, sebagian caleg yang bertarung di Dapil DKI Jakarta 2 menerapkan praktik patronase. Baik itu dilakukan caleg yang berasal dari parpol nasionalis maupun Islamis. Di tingkat DPR pusat dan DPRD provinsi. Bentuk patronase yang diberikan diantara dua kubu ini tidak jauh berberda. Yakni berupa uang, barang, jasa serta janji-janji bantuan lain setelah terpilih menjadi alat bagi kandidat untuk mendapat dukungan pemilih.

Di tataran nilai, caleg yang berasal dari parpol nasionalis maupun Islam sama-sama sepakat menolak praktik politik uang dalam Pemilu. Caleg nasionalis (yang berasal dari parpol nasionalis) berargumen penolakan praktek politik uang dalam Pemilu berlandaskan pada moralitas dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip berdemokrasi.

Sementara itu, caleg Islamis (yang berasal dari parpol beridentitas Islam) menolak praktik politik uang dengan dalil-dalil agama. Yakni, orang yang memberi maupun yang menerima suap sama-sama dosa. Politik uang dipahami secara jelas sebagai bentuk suap yang sangat dilarang oleh agama. Atau dengan istilah lain, politik uang adalah perbuatan yang haram.

Dengan begitu, ada pemahaman yang sempit oleh caleg nasionalis maupun agamis terkait dengan politik patronase. Pembelian suara hanya dipahami seorang caleg memberikan uang pada pemilih agar mendukungnya saat hari pencoblosan. Sementara itu, bentuk pemberian lainnya mereka lakukan.

Padahal, politik uang hanya merupakan salah satu bentuk dari politik patronase. Selain *money politic*, patronase masih memiliki banyak varian lain. Sebab, patronase didefinisikan sebagai praktek pemberian uang, barang, jasa atau peluang ekonomi yang bertujuan untuk mendapat dukungan politik. Mengacu konsep tersebut, selain berupa uang, patronase dapat berwujud hal lain. Seperti benda maupun barang. Jika kandidat membagikan sembako atau membangun rumah ibadah, mengaspal jalan untuk sebuah kelompok masyarakat, itu masuk dalam kategori patronase. (lihat Edward, 2014)

Selain uang dan barang, patronase juga berbentuk pemberian pelayanan. Misalkan pemberian pendidikan dan kesehatan gratis hanya untuk kelompok tertentu. Kelompok tertentu ini biasanya menjadi basis pendukung kandidat atau pun masyarakat yang potensial akan memberikan suaranya dalam Pemilu. Bentuk lain dari patronase yakni pemberian peluang ekonomi oleh kandidat pada perseorangan atau kelompok masyarakat. Peluang ekonomi ini bentuknya banyak. Dari pekerjaan, kontrak, proyek hingga izin usaha.

Sementara itu Marcus Meitzner menambahkan varian patronase. Menurut dia, janji-janji yang disampaikan oleh caleg pada pemilih masuk dalam bentuk praktik patronase atau politik uang. Janji-janji yang umumnya disampaikan Caleg yakni berbentuk kebijakan publik dan janji pemberian bantuan hingga jabatan atau pekerjaan. Semua janji tersebut, oleh caleg bakal diwujudkan saat dirinya terpilih dalam Pemilu.

Caleg Dapil DKI Jakarta 2 yang melakukan praktik patronase menganggap, pemberian barang dan uang pada komunitas bukan merupakan bentuk politik uang. Sehingga, praktek semacam ini dianggap sebagai sebuah hal yang wajar. Maka itu, secara umum bentuk patronase yang terjadi yakni kandidat memberikan sumbangan pada kelompok majelis taklim atau pun rumah ibadah. Sumbangan ini bisa berupa uang maupun barang. Selain itu, ada pula bentuk bantuan caleg yang lain, semacam perbaikan jalan, WC umum, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) hingga asuransi jiwa.

I. Tebar Asuransi Jaring Pemilih

Patronase oleh sebagian besar caleg nasionalis, didistribusikan pada kelompok masyarakat yang bersifat heterogen. Baik dari segi etnis maupun agama. Kelompok masyarakat ini biasanya terikat dalam sebuah wilayah atau geografis. Seperti kampung, kelurahan, RT/RW. Selain itu juga pada komunitas profesi tertentu. Bentuk patronase yang diberikan berupa uang, perbaikan jalan, WC umum, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), asuransi jiwa dan beasiswa kuliah.

Caleg PDIP untuk DPRD Provinsi Prasetio Edi Marsudi mengaku membagikan 60 ribu kaos plus uang Rp500 ribu. Kaos bertuliskan "Sohib Pras" itu wajib dikenakan oleh pedagang kopi keliling hingga petugas kebersihan setiap hari. Dengan kaos yang dibagikan, Caleg Dapil I ini ingin membangun *mindset* masyarakat agar memilih dirinya. Sedangkan uang Rp500 ribu itu diberikan agar pedagang kopi dan petugas kebersihan selalu memakai kaos dan memilih dirinya saat Pemilu.

Selain menyebar ribuan kaos dan uang, Prasetio juga memberi bantuan pada kelompok masyarakat. Bantuan yang dia berikan dianggap sebuah *cost politic* yang wajar dikeluarkan oleh caleg.

"(Minta perbaikan) jalan rusak, wc umum, MCK, penerangan lampu, karpet mushola. Itu wajar. Namanya cost politik saya. Tapi kasih uang ke mereka tidak. Uang akhirnya politik pragmatis, kalau ini kan saya jadi dekat dengan mereka. "
(wawancara 4 Maret 2014)

Caleg DPR pusat asal Demokrat Kartorius Sinaga mengaku juga memberikan berbagai jenis bantuan pada masyarakat. Bentuk patronase yang diberikan, antara lain berupa fogging, pendampingan untuk urusan ijazah, santunan kematian, beasiswa dan juga operasi katarak gratis. Sedangkan Caleg Golkar tingkat provinsi Ruddin Akbar Lubis memilih memberikan kupon berobat gratis pada masyarakat. Kupon berobat gratis ini bisa digunakan masyarakat di klinik Rudal Media yang berada di Menteng dan Pegangsaan Jakarta Pusat. Saat masa kampanye, Ruddin sudah membagikan kupon berobat gratis sebanyak 3.000 kupon.

Bentuk lain dari praktek patronase dilakukan oleh Caleg DPR RI asal Partai Hanura, Bambang Marsono. Caleg nomor urut 1 ini mengobrol beasiswa pada masyarakat Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Bambang berusaha mendapat simpati pemilih dengan tawaran potongan uang kuliah hingga 75 persen bagi masyarakat yang ingin kuliah di STIE Trianandra, Rawamangun. Ya, saat ini Bambang memang menjadi *owner* STIE Trianandra.

Hingga sebelum pelaksanaan Pemilu 9 April, Bambang mengaku sudah membagikan ratusan ribu brosur beasiswa. Brosur beasiswa ini didistribusikan melalui pos maupun jaringan yang dimiliki Bambang Marsono. Meski mengelak jika beasiswa itu bukan bentuk *vote buying*, tetapi kalau dilihat dari konten brosur dan momentum pembagiannya, agak sulit terbantah jika hal itu bukan patronase. Selain terdapat formulir pendaftaran serta informasi pendidikan, dalam brosur tersebut juga terdapat foto Bambang Marsono lengkap dengan identitas Caleg DPR RI nomor urut 1 Partai Hanura.

"Sudah ada ratusan ribu brosur yang disebar dan sekarang mau cetak puluhan ribu lagi." (wawancara 13 Maret 2014)

Bentuk patronase lainnya yang menarik yakni pembagian asuransi jiwa. Pola ini secara khusus dilakukan semua Caleg Hanura yang bertarung di Dapil DKI 2. Kalau ditelusuri, Kartu Kader Penggerak Hanura (KKPH) berasuransi ini memang merupakan program DPP Hanura yang bekerja sama dengan MNC Life. MNC Life diketahui sebagai perusahaan asuransi milik Hary Tanoesudibjo (HT) yang merupakan pasangan Capres Wiranto. Bagi masyarakat yang memegang asuransi ini akan mendapat santunan Rp9 juta jika meninggal dalam kecelakaan dan Rp1 juta jika meninggal karena sakit.

Dilihat dari momentum pembagiannya menjelang Pemilu, maka pembagian asuransi Hanura ini sangat kental sebagai bentuk patronase. Bambang Marsono, Andi Saiful Haq, Tajuddin Nor dan Tohir yang menjadi informan dalam penelitian ini mengaku semuanya membagikan kartu asuransi selama masa kampanye. Masing-masing Caleg Hanura mendapat jatah kartu asuransi berbeda-beda. Paling sedikit, seorang caleg menerima 1.000 kartu asuransi

dan paling banyak mendapat hingga 28.000 kartu asuransi. Kartu tersebut dibagikan pada caleg baik melalui DPP maupun DPD Hanura DKI Jakarta.

Caleg nomor urut 2, Andi Saiful Haq mendapat jatah paling banyak. Wakil Ketua DPP Persatuan Indonesia (Perindo) yang juga dekat dengan Hary Tanoesudibjo (HT) ini mendapat 28.000 kartu asuransi. Mantan anggota Kontras Aceh ini mengaku seluruh kartu asuransi sudah dibagikan pada masyarakat Jakarta Selatan dan Pusat. Pembagian puluhan ribu asuransi itu melalui jaringan partai, Ormas Perindo maupun caleg tandem (tingkat provinsi).

"Saat ini saya sudah membagikan sekitar 28 ribu kartu asuransi. Pembagian melalui struktur partai, Perindo maupun Caleg. Jadi asuransi ini kan sebagai bentuk kepedulian Hanura pada masyarakat. Yang memiliki kartu asuransi ini akan mendapat santunan kematian Rp1 juta hingga Rp9 juta." (wawancara, 27 Maret 2014)

Sementara itu, Caleg Hanura nomor urut 7 Tohir menjelaskan bagaimana proses pembagaaian kartu asuransi itu hingga ke tangan masyarakat. Pertama, masyarakat calon penerima didata oleh tim sukses (timses). Setelah didata, kemudian kartu asuransi dibagikan pada masyarakat. Mereka hanya diminta untuk mengisi formulir saja. Setelah itu, kartu asuransi berpindah ke tangan mereka.

II. Sambal Pengingat dan Pengikat untuk Majelis Taklim

Seperti dijelaskan di atas, tidak ada perbendaan tajam bentuk patronase yang dilakukan caleg nasionalis dengan caleg Islamis di DKI Jakarta. Yang membedakan antara keduanya adalah sasaran penerimanya. Caleg Islamis lebih dominan menyalurkan bantuan menjelang Pemilu pada majelis taklim, masjid, Ormas Islam maupun pondok pesantren. Mereka relatif mudah masuk ke dalam komunitas Islam, karena label Parpol Islam. Selain itu, partai Islam tertentu memang secara khusus melakukan pembinaan terhadap majelis taklim maupun ormas Islam.

Bentuk patronase yang diberikan berupa uang kas, pengeras suara, karpet dan pompa air. Penyaluran uang ataupun barang oleh caleg atau pun Timses umumnya bekerja sama dengan ketua majelis taklim, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau mushola, pimpinan Ormas hingga ustadz dan ustadzah.

Misalkan, Caleg DPR RI asal salah satu partai politik Islam, DA memberikan bantuan uang ataupun barang pada tiga kelompok sasaran. Pertama kelompok majelis taklim, kedua ormas dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Pada majelis taklim, Caleg nomor urut 2 ini

mengaku memberikan semacam uang kas. Uang kas yang diberikan biasanya sebesar Rp500 ribu. Sumbangan itu diberikan usai dia mengadakan pertemuan atau sosialisasi dengan kelompok pengajian.

"Saya memberikan Rp500 ribu sebagai uang kas bagi majelis taklim." (wawancara 7 Maret 2014)

Pada salah satu Ormas, DA mengaku juga melakukan hal serupa. Sedangkan untuk DKM (rumah ibadah), anggota DPD periode 2009-2014 ini mengaku pernah memberikan bantuan berupa mesin pompa air, karpet dan pengeras suara.

Selain bantuan uang kas, DA juga memberikan "Sambal Caleg". Bagi sebagian orang, sambal menjadi menu wajib saat makan. Dengan demikian "Sambal Caleg" bisa diterima semua kalangan dan usia. "Sambal Caleg" yang disebar DA, berupa sambal cabe yang dikemas dalam botol kecil. Nuansa patronase terlihat sangat kental, karena didistribusikan dalam masa kampanye. Selain itu, kemasan sambal terdapat identitas lengkap caleg. Yakni dari foto, nama, Parpol serta nomor urut dan dapil.

Selama masa kampanye DA membagikan 500 botol "Sambal Caleg". Tiap botol "Sambal Caleg" dia pesan seharga Rp8.500 kepada salah seorang kader PKS. Dengan memesan 500 botol, maka DA mengeluarkan uang Rp4.250.000.

"Nanti dibagikan saat pengajian. Biar masyarakat selalu ingat. Sebab, sambal itu menjadi menu wajib bagi masyarakat Jakarta. Jadi kalau mereka makan akan selalu ingat kita ." (wawancara 7 Maret 2014)

Bentuk patronase semacam ini juga dilakukan caleg asal partai Islam lainnya, GO. GO menjadikan majelis taklim sebagai basis utama dukungannya. Kebanyakan majelis taklim yang dia garap berada di wilayah Pasar Minggu. Caleg nomor urut 5 ini mengaku juga kerap memberikan bantuan pada kelompok pengajian di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.

Nilai bantuan yang diberikan GO lebih tinggi dibanding koleganya, DA. Jika DA memberikan bantuan sebesar Rp500 ribu, maka nilai bantuan Igo hingga Rp1 juta pada setiap kelompok majelis taklim.

"Kalau ada majelis taklim yang minta bantuan, kadang saya beri kadang juga tidak. Kalau nilainya sekitar Rp1 juta masih dalam batas wajar lah." (wawancara 19 Maret 2014).

GO yang kini masih menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta ini juga berusaha mendapatkan dukungan pemilih dengan cara membantu dalam penyaluran dana hibah. Dana hibah yang bersumber APBD itu, kata dia, diberikan pada yayasan bukan perseorangan. Selain itu, dalam berinteraksi GO juga menyampaikan program kesehatan gratis Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan pendidikan gratis pada masyarakat.

"Dana hibah kan ada payung hukumnya. Sejauh yang mengajukan memenuhi syarat maka akan diberikan." (wawancara 19 Maret 2014).

Sementara itu, Caleg PKB Abdul Wahid Maktub dan Caleg PBB Sisca Devianti lebih banyak menyampaikan janji bantuan pada masyarakat jika kelak bisa terpilih. Dalam sosialisasi dengan dengan kelompok pengajian di Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan, Caleg nomor urut 1 ini menjanjikan bantuan jika kelak dirinya jadi anggota DPR.

"Kalau ibu-ibu memilih saya, maka ibu akan memiliki teman seorang anggota dewan. Dengan begitu akan mudah jika ibu-ibu sedang menghadapi masalah. Saya akan bantu," janjinya." (shadowing candidate, 31 Maret 2014)

Janji yang lebih spesifik diungkapkan Caleg PBB Sisca Devianti di hadapan jamaah pengajian di Jakarta Pusat. Pada mereka, Sisca menjanjikan akan memberi bantuan pada setiap majelis taklim. Bantuan itu, kata dia, bersumber dari APBN. Karena jika berhasil terpilih, maka dia akan lebih mudah mengusulkan program saat pembahasan anggaran di DPR.

D. Sasaran Patronase

Berbagi Lahan Garapan Politik Patronase

Meski sama-sama melakukan politik patronase, antara caleg nasionalis dan Islamis memiliki sasaran yang berbeda. Sasaran berbeda ini dipengaruhi oleh profil latar belakang partai politik sang caleg. Profil partai politik yang berbeda ini kemudian membentuk "pasar" sendiri-sendiri. Umumnya, distribusi patronase caleg nasionalis lebih banyak diarahkan pada kelompok masyarakat yang memiliki karakter heterogen. Sementara itu, caleg Islamis lebih banyak menyalurkan patronase pada kalangan masyarakat yang memiliki sifat homogen, terutama dalam aspek agama.

Kendati demikian, ada pula caleg nasionalis yang mendistribusikan patronase pada kelompok masyarakat yang memiliki sifat seragam dalam keyakinan agama dan juga sebaliknya, caleg Islamis mendistribusikan patronase pada kelompok masyarakat heterogen. Namun, ini sifatnya kasuistik. Hal ini bisa terjadi karena caleg nasionalis ini memiliki latar belakang keluarga atau pernah berkecimpung sebagai aktivis Islam. Namun pilihan politiknya pada partai politik nasionalis. Tetapi pola umum yang terjadi, yakni distribusi patronase caleg nasionalis pada kelompok masyarakat heterogen dan distribusi patronase caleg Islamis pada kelompok masyarakat yang memiliki pandangan keagamaan yang sama.

Patronase oleh sebagian besar caleg nasionalis, didistribusikan pada kelompok masyarakat yang bersifat heterogen. Baik dari segi etnis maupun agama. Kelompok masyarakat ini biasanya terikat dalam sebuah wilayah atau geografis. Seperti RT/RW, kampung dan kelurahan. Bentuk patronase yang diberikan berupa uang, perbaikan jalan, WC umum, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), asuransi jiwa dan beasiswa kuliah.

Alasan caleg nasionalis mendistribusikan ke kelompok masyarakat heterogen, karena profil partai politik para caleg sesuai dengan karakter kelompok masyarakat tersebut. Umumnya, caleg nasionalis lebih inklusif sehingga mudah masuk ke masyarakat yang memiliki tipe heterogen dari aspek agama, budaya maupun suku. Kelompok masyarakat yang heterogen tersebut biasanya diikat dalam wilayah geografis. Seperti, RT/RW, kampung, kelurahan dan kecamatan. Selain terikat wilayah, adapula masyarakat yang tergabung dalam komunitas profesi tertentu yang juga memiliki sifat heterogen. Misalkan komunitas pedagang kopi keliling dan komunitas petugas kebersihan.

Profil caleg nasionalis klop dengan karakter kelompok masyarakat yang heterogen. Dalam pilihan politik, umumnya kelompok masyarakat ini tidak berlandaskan sentimen suku, budaya dan khususnya agama. Ini juga yang diakui Caleg Hanura Tajuddien Noor. Karena dia berasal dari partai nasionalis maka dia merasa lebih mudah mendekati komunitas warga di RT/RW. Selama sosialisasi, Tajuddien kerap melakukan pertemuan RT/RW yang diikuti 10-20 warga.

"Saya lebih banyak berinteraksi dengan warga di pertemuan RT/RW. Belum lama ini saya baru saja mengunjungi warga di Bukit Duri. Kita mengadakan pertemuan warga yang diikuti sekitar 20 warga. Sejauh ini memang saya lebih mudah masuk ke lingkungan masyarakat heterogen." (wawancara 4 Maret 2014)

Ada pula caleg nasionalis yang memilih komunitas profesi tertentu untuk menyalurkan patronase. Ini dilakukan Caleg PDIP untuk DPRD Provinsi DKI Prasetio Edi Marsudi. Caleg ini secara khusus menggarap komunitas penjual kopi dan petugas kebersihan. Dia beralasan

mendekati komunitas penjual kopi keliling dan petugas kebersihan, karena profil partainya identik dengan partai *wong cilik* dan terbuka, maka sesuai dengan karakter komunitas masyarakat yang disasar.

Pada pedagang kopi keliling dan petugas kebersihan, Prasetio mengaku membagikan 60 ribu kaos plus uang Rp500 ribu. Kaos bertuliskan "Sohib Pras" itu wajib dikenakan oleh pedagang kopi keliling hingga petugas kebersihan setiap hari. Dengan kaos yang dibagikan, Caleg Dapil I ini ingin membangun *mindset* masyarakat agar memilih dirinya. Sedangkan uang Rp 500 ribu itu diberikan agar pedagang kopi dan petugas kebersihan selalu memakai kaos dan memilih dirinya saat Pemilu.

"Saya membagikan kaos dan uang Rp500 ribu untuk para pedagang kopi keliling dan petugas kebersihan. Ini untuk membangun mindset masyarakat agar memilih saya dalam pemilu." (wawancara, 4 Maret)

Di sisi lain, caleg nasionalis agak susah menembus kelompok masyarakat yang tipenya homogen. Terutama homogen dalam soal keyakinan agama. Seperti majelis taklim, dewan kemakmuran masjid atau mushola dan pondok pesantren serta Ormas Islam. Sebagian kecil saja caleg nasionalis yang menggarap dan kemudian mendistribusikan patronase padan komunitas masyarakat homogen (kelompok pengajian, masjid, pondok pesantren dan ormas Islam). Ini bisa terjadi karena latar belakangnya berasal dari keluarga besar (keturunan ulama, kyai atau habib) dan organisasi Islam.

Contohnya, ini dilakukan Caleg Hanura Sayyid Tohir Bin Yahya. Meski berasal dari partai politik nasionalis, Tohir juga menggarap kelompok pemilih Islam. Ini bisa terjadi karena tak lepas dari latar belakang keluarga dan aktivitas Tohir sebelumnya. Pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini merupakan cucu dari Al Habib Ustman Bin Yahya yang seorang penyebar Islam di Jakarta saat masa penjajahan. Selain berasal dari keluarga ulama, Tohir juga dekat dengan salah satu ormas Islam di Jakarta.

Seperti dijelaskan di atas, ada pembagian pasar distribusi politik patronase. Jika caleg nasionalis pada komunitas masyarakat heterogen, caleg Islamis merajai atau lebih dominan pada komunitas pemilih Islam. Distribusi patronase yang dilakukan caleg Islamis, yakni pada kelompok pengajian, dewan kemakmuran masjid-mushola, pondok pesantren dan ormas Islam.

Mengapa caleg Islamis lebih memilih mendistribusikan patronase pada kalangan kelompok pengajian, masjid, pondok pesantren dan ormas Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut setidaknya ada dua alasan. *Pertama*, caleg Islamis lebih mudah diterima kalangan Islam dibandingkan dengan caleg nasionalis. Biasanya, masyarakat yang berada dalam

kelompok homogen (Islam), soal identitas keislaman menjadi hal penting dalam menentukan pilihan politik. Dengan begitu, padangan politik antara caleg Islamis dengan komunitas di majelis taklim, aktivis masjid, pondok pesantren dan Ormas Islam ini dalam frekuensi yang sama. *Kedua*, caleg Islamis lebih yakin, uang dan barang yang diberikan akan lebih mempengaruhi pilihan politik pemilih Islam, dibandingkan uang dan barang yang diberikan caleg nasionalis. Keyakinan ini didasarkan pada kesamaan pandangan antara caleg Islamis dan pemilih Islam.

Caleg asal salah satu partai politik Islam, DA mengaku menyalurkan patronase lebih banyak ke kelompok pengajian dan masjid, baik yang berada di Jakarta Pusat maupun Jakarta Selatan. Sebagai caleg Islamis, DA sudah sering berinteraksi dengan kalangan pengajian. Ini dilakukan saat dirinya masih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta hingga saat ini. Dengan begitu, dia sangat mudah diterima oleh kelompok dan pengurus atau aktivis masjid. Menyalurkan patronase pada kelompok pengajian juga dilakukan kolega separtai, GO. Sebagai salah satu pengurus partai, GO merasa makin mudah lagi masuk ke dalam majelis taklim. Menurutny, beberapa majelis taklim merupakan binaan dari partainya di DKI Jakarta.

Ini juga dilakukan caleg PKB Abdul Wahid Maktub dan caleg PBB Sisca Devianti. Keduanya mengaku kerap diundang atau berinisiatif hadir dalam kelompok pengajian yang berada di wilayah Jakarta Pusat maupun Jakarta Selatan. Secara khusus, Abdul Wahid Maktub lebih banyak menggarap pemilih yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU). Karena memang, Wahid memiliki latar belakang NU.

E. Aktor Politik Patronase

Dalam aspek aktor, ada perbedaan antara caleg nasionalis dengan Islamis. Orang-orang yang berperan di sini mengikuti sasaran patronase yang dibagikan. Kalangan caleg nasionalis lebih banyak melibatkan pengurus RT/RW, tokoh masyarakat dan ketua karang taruna dalam membagikan barang ataupun uang. Sementara itu caleg Islamis lebih banyak melibatkan pengurus majelis taklim, dewan kemakmuran masjid dan pengurus pondok pesantren serta ormas.

Seluruh aktor, baik pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, karang taruna, pengurus majelis taklim, dewan kemakmuran masjid hingga pengurus ormas, sedikitnya memiliki dua peran. *Pertama*, berperan sebagai *broker* atau penghubung antara caleg dengan penerima patronase. Uang dan barang sebelum sampai pada individu ataupun lembaga, terlebih dahulu melewati tangan penghubung ini. *Kedua*, mereka melakukan peran mobilisasi massa di tingkat lapangan. Ini bisa dilakukan karena mereka memiliki pengikut sekaligus pengaruh.

Bagi caleg nasionalis, lebih banyak melibatkan ketua RT/RW dan tokoh masyarakat, karena sasaran distribusi patronase ditujukan pada kelompok masyarakat yang heterogen. Yakni masyarakat yang tinggal di lingkungan RT/RW, kampung dan kelurahan. Merekalah yang mengetahui kebutuhan pemilih sekaligus menyampaikan permintaan bantuan uang atau barang pada sang caleg. Jika telah terjadi kesepakatan, maka barang atau uang itu akan diberikan oleh timses inti atau bisa jadi caleg langsung pada para *broker*.

Sementara itu, caleg Islamis lebih banyak melibatkan pengurus majelis taklim dan dewan kemakmuran masjid dalam mendistribusikan patronase. Salah satu caleg Islamis, DA mengaku tiap pertemuan dengan majelis taklim mengeluarkan dana Rp4,5 juta. Dana itu digunakan untuk biaya makan minum atau pengganti dana *snack*. Selain itu, anggaran itu juga disisihkan sebesar Rp500 ribu untuk uang kas majelis taklim tersebut. Saat hendak menghadiri pengajian ibu-ibu di daerah Pasar Minggu dia terlebih dahulu mentransfer dana tersebut pada salah satu tim suksesnya. Tim sukses yang mengenal ketua majelis taklim tersebut kemudian menyerahkan anggaran sosialisasi itu pada sang ketua majelis taklim.

Jika dituangkan dalam bentuk tabel, maka perbandingan praktik patronase antara caleg Parpol Nasionalis dengan caleg berlatar belakang Parpol beridentitas Islamis sebagai berikut.

Tabel. 3
Perbandingan Bentuk Patronase Caleg Nasionalis dan Islamis

Latar Belangkan Parpol Caleg	Wujud Patronase	Sasaran	Aktor yang Terlibat
Nasionalis	uang, perbaikan jalan, WC umum, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), asuransi jiwa dan beasiswa kuliah, pembuatan SIM C, kupon berobat gratis, fogging, pendampingan untuk urusan ijazah, santunan kematian, dan juga operasi	Kelompok masyarakat yang heterogin. Seperti kampung, kelurahan, RT dan RW	Tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dan karang taruna

Latar Belakang Parpol Caleg	Wujud Patronase	Sasaran	Aktor yang Terlibat
	katarak gratis, ambulans.		
Islamis	Uang, sambal caleg, karpet, pengeras suara, pompa air, janji bantuan anggaran majelis taklim, ambulans, perbaikan jalan dan WC umun, bantuan hibah	Majelis taklim, Ormas Islam, rumah ibadah, dan pondok pesantren	Pengurus majelis taklim, pimpinan Ormas Islam dan pimpinan pondok pesantren

Dalam struktur tim pemenangan, *broker* yang bertugas mendistribusikan patronase masuk dalam level tim tingkat lapangan. Sebab pada umumnya, struktur tim pemenangan caleg di DKI Jakarta terdiri dari level atas, menengah dan bawah. Pada struktur level atas atau *ring 1* ini berisi tim inti. Sedangkan struktur level menengah berada di kota dan kecamatan. Sedangkan struktur bawah berada di kelurahan hingga RT/RW. Nah, struktur tingkat bawah ini yang kerap berfungsi sebagai *broker* atau aktor yang mendistribusikan patronase.

Sementara itu dalam pembentukan timses inti atau *ring 1*, hampir tidak ada perbedaan antara caleg nasionalis maupun Islamis. Timses inti yang terlibat umumnya berasal dari dalam maupun luar partai.

Ada beberapa pola yang dilakukan caleg dalam pembentukan tim sukses inti. *Pertama*, pertimbangan kesamaan organisasi. Yakni, Caleg mengangkat Timses berdasarkan organisasi yang sama. Umumnya, dalam pola ini jenjang pendidikan Timses relatif baik. Yakni minimal S-1 hingga S-2. Selain itu, dengan pengalaman organisasi, Timses lebih mudah dalam mengkonsep strategi pemenangan hingga melakukan penggalangan dukungan secara langsung.

Pola ini dilakukan Caleg PKB Abdul Wahid Maktub. Abdul Mukhlis, ketua timsesnya merupakan jebolan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Surabaya, Jawa Timur. Sebagaimana Mukhlis, Abdul Wahid juga pernah bergabung dengan PMII. Dengan memiliki kesamaan latar belakang organisasi, Timses lebih mudah menjabarkan visi dan misi Caleg. Ini juga yang diakui Abdul Mukhlis.

"Saya berlatar belakang PMII sama seperti Pak Wahid. Dengan background organisasi yang sama lebih mudah saja dalam menjabarkan program Caleg. Agenda besar yang diusung Pak Wahid kita paham, walaupun sebelumnya tidak dijelaskan secara detail pada saya." (wawancara, 31 Maret 2014)

Kandidat yang memilih perekrutan semacam ini biasanya memiliki pengalaman sebagai aktivis, politik maupun pemerintahan sebelumnya. Ini sesuai dengan latar belakang Abdul Wahid yang merupakan bekas Duta Besar Qatar dan sekarang menjabat pengurus DPP PKB.

Kedua, pertimbangan agama dan primordialisme. Yakni, seorang Caleg mengangkat Timses berdasar kesamaan daerah asal dan agama. Ini dilakukan Caleg Hanura Tajuddin Noor. Timsesnya, Fatimah Muhammad sama-sama berasal dari Maluku, seperti halnya Tajuddin Noor. Dia merasa, Timses yang berasal dari daerah sama bisa saling memahami karakter masing-masing serta memiliki loyalitas cukup tinggi.

Meski saling memahami karakter masing-masing, tetapi pola perekrutan ini memiliki sejumlah kelemahan. Umumnya, mereka yang direkrut merupakan orang-orang yang kurang berpengalaman dalam usaha pemenangan. Selain itu, jaringan yang dimiliki tidak lah kuat. Karena tidak matang dalam pengalaman dan jaringan, biasanya kelompok tim sukses ini kurang berhasil. Dilihat *background* kandidat, biasanya yang memilih pola perekrutan model ini berasal dari Caleg yang kurang memiliki pengalaman berpolitik sebelumnya. Ini juga sesuai dengan profil Tajuddin yang baru pertama kali maju sebagai menjadi Caleg.

Ketiga, pertimbangan keluarga. Yakni, Caleg mengangkat Timses yang berasal dari keluarga dekat. Ini dilakukan Caleg PKB Lucluck Maxnon dan Caleg PBB Sisca Devianti. Dua Caleg perempuan ini mengangkat Timses yang berasal dari keluarga dekat. Yakni, paman, suami hingga ibu kandung. Alasan Caleg menggunakan pola ini karena menganggap, Timses yang berasal dari keluarga dekat memiliki loyalitas yang lebih tinggi dibanding Timses dari luar.

Dilihat latar belakang kandidat, pola perekrutan Timses ini biasanya dilakukan oleh Caleg pendatang baru dan memiliki modal yang cekak. Misalkan Caleg PKB Lucluck masih berusia cukup belia. Yakni berumur 25 tahun. Hingga saat ini Lucluck juga masih tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Politik, Fisip, UIN Jakarta. Hal sama juga tampak dari profil Caleg PBB Sisca Devianti. Perempuan yang berprofesi sebagai pengajar bahasa Inggris ini sebelumnya tidak memiliki pengalaman berpolitik. Dia dijadikan caleg, karena ditunjuk salah satu pengurus DPP yang kebetulan memiliki hubungan kekerabatan. Selama berkampanye, Sisca mengaku mengeluarkan dana sekitar Rp60 juta.

Selain loyal, Timses yang berasal dari keluarga dekat bisa menghemat dana. Pada umumnya, Timses ini tidak terlalu mengharapkan materi dari sang caleg. Ada pun jika ada

semacam honor, sifatnya sukarela saja. Meski memiliki loyalitas tinggi dan berbiaya murah, Timses kelompok ini memiliki sejumlah kelemahan. Antara lain, Timses kurang memiliki pengalaman dan jaringan yang lemah. Dengan begitu, kinerja mereka kurang berhasil dalam mengangkat suara caleg.

Keempat, pertimbangan jaringan. Yaitu, pertimbangan seberapa besar pengaruh tokoh untuk bisa membantu mendulang suara dalam Pemilu. Ini yang dilakukan Caleg PPP Kivlan Zen dan Caleg Hanura Sayyid Tohir Bin Yahya. Kivlan merekrut Chandra Halim sebagai salah satu Timsesnya. Alasannya, Chandra yang juga menjabat Ketua Umum Perisai Jakarta ini memiliki jaringan hingga tingkat kelurahan. Sementara itu, Caleg Hanura memilih Kyai sebagai Timsesnya. Karena, Kyai memiliki pengaruh cukup besar dalam struktur sosial maupun politik di Indonesia.

Pola perekrutan ini Timses memiliki keunggulan dalam jaringan yang luas. Dengan demikian memudahkan caleg untuk melakukan sosialisasi maupun mendapat dukungan pemilih. Tetapi, pola ini juga mengandung kelemahan. Salah satunya, yakni soal loyalitas yang rendah. Timses yang memiliki jaringan luas, cenderung untuk main dua kaki dan berorientasi pada materi.

Dilihat dari latar belakang caleg, biasanya yang menggunakan pertimbangan jaringan dalam merekrut tim sukses, umumnya merupakan kandidat yang sudah berpengalaman. Misalkan saja, Caleg PPP Kivlan Zen kenyang pengalaman melakukan mobilisasi atau merancang strategi. Hal ini karena Kivlan merupakan bekas salah satu petinggi TNI dengan pangkat terakhir Mayjend (Pur). Sedangkan, Caleg Hanura Hanura Sayyid Tohir Bin Yahya memiliki pengalaman mengikuti Pemilu. Pada Pemilu 2009, Tohir maju di Dapil Jawa Timur.

Selain pola di atas, ada pula pola kombinasi yang dilakukan caleg dalam membangun Timses. Misalkan mengkombinasikan antara pertimbangan kesamaan organisasi sekaligus agama dan daerah yang sama. Ada pula pertimbangan asal daerah yang sama dengan tokoh yang memiliki jaringan. Dengan pola kombinasi ini maka akan dihasilkan Timses yang loyal sekaligus memiliki pengalaman dan jaringan yang luas.

Dengan begitu kalau ditampilkan dalam sebuah tabel, pola dan pertimbangan perekrutan Tim Sukses (Timses) oleh Caleg Dapil DKI Jakarta sebagai berikut :

Tabel. 4
Pola dan Pertimbangan Perekrutan Timses Dapil DKI Jakarta 2

Pertimbangan	Keunggulan Timses	Kelemahan Timses	Profil Caleg
Kesamaan Organisasi	Kesamaan visi-misi, berpengalaman dan menguasai medan	Berpotensi tidak loyal	Berpengalaman dalam berpolitik
Kesamaan agama dan daerah	Memahami karakter masing-masing, cenderung loyal pada Caleg	Tidak memiliki pengalaman dan jaringan lemah	Kurang memiliki pengalaman berpolitik
Keluarga	Memahami karakter masing-masing, Memiliki loyalitas tinggi	Tidak berpengalaman dan jaringan lemah	Minim pengalaman organisasi atau politik
Jaringan	Berpengalaman dan menguasai medan	Cenderung tidak loyal	Memiliki pengalaman politik

Dari empat pertimbangan dalam menentukan Timses, pertimbangan kesamaan organisasi dan jaringan lebih cenderung berhasil membentuk Timses yang efektif. Meski Timses ini memiliki potensi tidak loyal, tetapi jika ada kontrol yang baik dari Caleg, maka Timses tidak akan bermain dua kaki atau melakukan penghianatan. Selain kontrol yang ketat, Caleg harus bisa menjamin "amunisi" yang cukup bagi Timses. "Amunisi" ini bisa berbentuk honor atau gaji dan fasilitas seperti mobil operasional, uang transportasi hingga komunikasi.

Jika itu dipenuhi maka kemungkinan upaya kemenangan akan lebih berhasil. Sebab, Timses dengan pertimbangan kesamaan organisasi dan jaringan, biasanya mereka lebih berpengalaman dan memiliki jaringan yang luas. Secara jenjang pendidikan, mereka biasanya berpendidikan S-1 hingga S-2.

Meski berasal dari pengurus partai, caleg tidak mudah begitu saja menggunakan struktur partai tingkat bawah. Sebab, kepentingan pengurus partai di tingkat bawah bermacam-macam. Maka itu, pilihannya caleg yang berasal dari pengurus partai tetap saja membuat tim sukses atau relawan. Ini juga yang dilakukan Caleg PKB Abdul Wahid Maktub (AWM). Wakil Ketua DPP PKB ini secara khusus membentuk relawan AWM Center. Tim sukses ini yang mengambil banyak peran untuk memobilisasi dukungan untuk Abdul Wahid Maktub. Selain itu, AWM Center

juga melakukan peran untuk membangun komunikasi politik dengan pengurus PKB di tingkat bawah, caleg tingkat provinsi dan tokoh Nadlatul Ulama (NU).

Sementara itu, Caleg Hanura Sayyid Tohir Bin Yahya sangat kental peran tim suksesnya. Tohir sendiri termasuk caleg yang bukan berasal dari pengurus Partai Hanura. Selain membentuk tim sukses di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, Tohir juga membentuk tim sukses di Luar Negeri (LN), khususnya di Malaysia. Tim sukses di Jakarta, mereka bertugas untuk merancang kegiatan pertemuan atau sosialisasi. Selain itu, tim sukses Tohir juga bertugas untuk mencari pasangan tandem. Yakni caleg tingkat provinsi. Ini diakui Koordinator Tim Sukses Tohir di Jakarta Pusat, Lilis.

Caleg Hanura tingkat provinsi yang diajak kerja sama yakni, Ferry. Yakni seorang caleg Hanura tingkat provinsi. Lilis dengan mudah menggandeng Caleg tingkat provinsi tersebut karena dia juga anggota Timses Ferry. Jadi selama ini, Lilis bermain dua kaki. Yakni membantu Tohir juga sekaligus bagian tim sukses Ferry. Kendati begitu, Lilis mengaku posisinya tersebut tidak masalah. Dia berdalih Caleg yang dibantu berasal dari partai yang sama dan tingkatan yang berbeda. Yakni tingkat pusat dan provinsi.

Menurutnya dengan posisi itu justru menguntungkan bagi dua Caleg. Sebab, memudahkan dalam berkoordinasi. Selama ini bentuk kerja sama yang dilakukan yakni dalam setiap sosialisasi Tohir mengkampanyekan Ferry dan sebaliknya juga begitu. Mereka, kata Lilis, juga kerap melakukan sosialisasi bersama.

Sementara itu di Malaysia, Tohir menerapkan strategi khusus. Langkah khusus ini bukan tanpa perhitungan. Sebab, setengah dari total Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) berada Malaysia. Yakni sekitar 1 juta pemilih. Di Malaysia, Tohir secara khusus menyasar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di sektor perkebunan dan tenaga kerja proyek konstruksi. Di sana, Tohir mentargetkan mendapat dukungan sebanyak 300 ribu suara.

Total selama empat bulan, tim Tohir yang berada di Malaysia sudah bekerja. Secara khusus, Tohir mendatangkan empat kyai asal Madura dan Jawa Timur. Kyai yang direkrut kebanyakan memiliki pondok pesantren (Ponpes) yang dia kenal saat Pemilu tahun 2009. Pada Pemilu 2009, Tohir menjadi Caleg Hanura Dapil Jawa Timur, namun kalah.

Caleg nomor urut 7 ini enggan menyebutkan nama-nama empat kyai yang ia rekrut. Namun yang jelas, tugas mereka cuma satu. Yakni, menggalang dukungan dari para TKI. Penggalangan ini dilakukan dengan cara kyai mendatangi kantung-kantung TKI. Mereka diajak untuk mendukung Caleg Hanura nomor urut 7 tersebut.

"Saya memang serius menggarap suara di Malaysia. Sudah sekitar empat bulan ini saya fokus di sana. Selama ini saya dibantu empat orang kyai asal Madura. Ini

*dilakukan karena para TKI kebanyakan merupakan murid dari kyai yang saya bawa.”
(wawancara, 2 April 2014)*

Berdasar data base yang dia pegang, sebagian besar TKI di Malaysia berasal dari Madura dan kota-kota di Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, TKI yang berasal dari Jawa Timur cenderung patuh pada bekas guru atau kyai mereka. Untuk "operasi" ini, Tohir mengaku telah menghabiskan uang sebanyak Rp100 juta. Dana itu, kata dia, kebanyakan digunakan untuk transportasi Indonesia-Malaysia, membayar penginapan dan menggaji empat kyai.

Meski sudah berkeringat, usaha mendapat dukungan TKI tidak berjalan mulus saat hari pemilihan 7 April 2014. Sebab, janji adanya *dropbox* oleh Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN) Malaysia tidak terbukti. Sebelumnya, *dropbox* bakal disiapkan di sejumlah kantung-kantung TKI. Ini dilakukan untuk memudahkan TKI maupun WNI yang tidak bisa menjangkau Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sebenarnya, Tohir sudah berhasil memobilisasi TKI pada hari pencoblosan. Namun, karena *dropbox* tak seperti yang dijanjikan, maka banyak pendukung Tohir yang tidak bisa memberikan hak suara. Untuk memobilisasi TKI ket TPS, Tohir mengaku tidak mampu. Sebab menurutnya, biaya sewa taxi di Malaysia sangat mahal.

F. Kesimpulan

Di tengah modernitas, keterbukaan dan rasionalitas dalam memilih, fenomena politik patronase menjadi hal unik dalam dinamika elektoral 2014 di Jakarta. Gejala politik uang yang cenderung menguat bisa menjadi petunjuk jika kelas menengah ke bawah di Jakarta lebih dominan mengambil peran dalam berpolitik dibanding kelas atas. Kelompok pemilih yang berasal dari golongan masyarakat menengah ke bawah cenderung pragmatis dalam menentukan pilihan politiknya. Program yang diusung caleg maupun parpol tidak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik mereka. Tetapi, apa yang diberikan kandidat pada masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Sementara itu, sikap pemilih yang berasal dari kelompok masyarakat atas, bentuk-bentuk pemberian kandidat tidak mempengaruhi pilihan politik mereka.

Dalam penelitian ini juga tampak bahwa hampir semua partai politik di Jakarta melakukan politik patronase. Politik patronase menjalar pada caleg yang berasal dari partai politik nasionalis maupun beridentitas Islam. Bentuk patronase yang dilakukan keduanya tidak terlalu mencolok perbedaannya. Tetapi hal yang berbeda adalah sasaran politik patronase dan siapa yang membantu mendistribusikan patronase. Caleg yang berasal dari partai politik nasionalis lebih menysasar pada kelompok masyarakat yang heterogen. Baik dari aspek etnisitas dan agama. Sementara itu, caleg yang berasal dari partai beridentitas Islamis lebih menysasar

kelompok masyarakat yang homogen terutama dalam aspek agama. Seperti kelompok pengajian, rumah ibadah, ormas dan pondok pesantren.

Siapa aktor yang ikut mendistribusikan patronase, karakternya juga berbeda antara keduanya. Caleg berlatar belakang partai nasionalis, patronase didistribusikan melalui tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dan tokoh pemuda. Sedangkan caleg Islamis, distribusi patronase lebih banyak melibatkan pengurus pengajian, DKM, pimpinan ormas dan pondok pesantren.

G. Bibliografi

Alfan, Alfian, 2012, *Demokrasi Pilihanku, Warna-Warni Politik Kita*, In-Trans, Malang

Aspinall, Edward, 2014. *Money Politics, Patronage, Political Networks, and Electoral Dynamics in Southeast Asia*, Bahan Presentasi Workshop Penelitian *Dimanika Politik Uang di Indonesia*, 1-2 Maret 2014 di Yogyakarta.

Mietzner, Marcus, 2014, *Partai Politik dan Politik Uang di Indonesia*. Bahan Workshop Penelitian *Dimanika Politik Uang di Indonesia*, 1-2 Maret 2014 di Yogyakarta.

A. Pamungkas, Sigit, 2014, *Partai Politik Terori dan Praktik di Indonsesia*, *Institute for Democracy and Welfarism*. Yogy